

D.N. AIDIT

PERANAN KOPERASI DEWASA INI

PERANAN KOPERASI
DEWASA INI

Rp 50.00

KAUM BURUH SEMUA NEGERI, BERSATULAH!

Seri
Kursus Rakjat
No. 4

rentjana kulit :
nugroho

D.N. AIDIT

PERANAN KOPERASI DEWASA INI

*

Depagitprop CC PKI
Djakarta 1963

CEK - 2001
6814 - b
PER. NEG. R. I.

D.N. AIDIT

PERANAN KOPERASI DEWASA INI

*

I S I

Pengantar 6

Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Sekarang 7

I. Tentang susunan ekonomi Indonesia jang hendak kita bangun sekarang 8

II. Tentang peranan, lapangan kegiatan dan perkembangan gerakan koperasi 13

III. Tentang peranan pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi dan beberapa persoalan Undang² Koperasi 24

1. Mengenai definisi 26

2. Mengenai prinsip demokrasi daripada koperasi 28

3. Lapangan usaha koperasi 27

4. Mengenai peranan pemerintah dalam gerakan koperasi 29

5. Daerah kerdja koperasi 30

Kembangkan Gerakan Koperasi Untuk Mengurangi Kesulitan² Beban Hidup Rakjat Dan Dalam Rangka Membangun Ekonomi Nasional 34

Sekedar Pengantar

Pada tanggal 28 Februari jang lalu, atas undangan Kepala Djawatan Koperasi Pusat, Menteri/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI, Kawan D.N. Aidit telah memberikan tjeramah jang berdjudul **Peranan Koperasi dalam pembangunan Ekonomi Indonesia Sekarang** didepan parapedjabat Departemen Koperasi dan Djawatan Koperasi Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta Raya, paradosen Akademi Koperasi dan Fakultas Ekonomi serta aktivis² berbagai djenis gerakan koperasi. Sebelum itu, jaitu pada tanggal 13 November 1962, Kawan Aidit atas nama Pimpinan MPRS telah pula menghadiri Musjawarah Pembiajaan Koperasi di Tjipajung dan menjampaikan sambutan tertulis.

Pada kedua kesempatan itu Kawan D.N. Aidit membahas soal² jang bukan hanja penting bagi para aktivis koperasi sadja, tetapi djuga bagi para anggota koperasi dan gerakan revolusioner umumnja, jaitu soal² jang menjangkut a.l. kedudukan koperasi, tugas² koperasi dan pembiajaan koperasi dalam tingkat pembangunan ekonomi nasional-demokratis serta prinsip² demokrasi didalam koperasi. Mengingat pentingnja soal² jang diadjukan itu untuk mendorong lebih madju dan untuk mengkonsolidasi gerakan koperasi sebagai salahsatu alat perdjuangan dibidang ekonomi maupun politik dalam rangka menjelesaikan tugas² Revolusi pada tahap sekarang ini, maka kedua bahan itu kami bukukan sebagai Seri **Kursus Rakjat** no. 4 dengan djudul **Peranan Koperasi Dewasa Ini.**

Djakarta, Djuni 1963

PERANAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA SEKARANG

Per-tama[2] saja utjapkan terimakasih kepada Sdr. Kepala Djawatan Koperasi Pusat jang telah meminta saja untuk memberikan tjeramah kepada Sdr.[2] hari ini. Permintaan itu saja terima dengan gembira.

Ini adalah untuk keduakalinja saja berkesempatan berhadapan dengan Sdr.[2] jang berketjimpung dengan masalah dan didalam gerakan koperasi. Pertama pada pertengahan November 1962 jl. pada Musjawarah Pembiajaan Koperasi di Tjipajung dimana saja ikut hadir, tetapi hanja berkesempatan memberikan sambutan tertulis, dan kali ini saja berhadapan dengan Sdr.[2] pedjabat[2] pada Departemen Koperasi dan Djawatan Koperasi Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raja, Dosen[2] pada Akademi Koperasi dan Fakultas Ekonomi serta terutama sekali Sdr.[2] aktivis dari berbagai djenis gerakan koperasi.

Uraian ini saja beri djudul **„Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Sekarang"** dengan pengertian bahwa bukan maksud saja untuk memperketjil peranan koperasi dalam masjarakat Indonesia dimasa datang, jaitu Indonesia jang sosialis, melainkan ingin memberikan tekanan kepada peranan sekarang daripada gerakan koperasi kita.

Atas permintaan Sdr. Kepala Djawatan Koperasi Pusat, saja djuga akan menguraikan persoalan Peranan Pemerintah terhadap gerakan koperasi.

Sudah tentu berbitjara tentang peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi negeri kita, tidak mungkin kita hanja menindjau dan menelaah „kotak gerakan koperasi" sadja, melainkan harus menindjau dan menelaah keseluruhannja dalam hubungannja dengan masalah ekonomi negeri, bahkan dalam hubungannja dengan masalah revolusi kita. Karena itu persoalan ini hendak saja kemukakan dengan pokok[2] sbb.:

PER. NEG. R. I.

I. **Tentang susunan ekonomi Indonesia jang hendak kita bangun sekarang.**
II. **Tentang peranan, lapangan kegiatan dan perkembangan gerakan koperasi.**
III. **Tentang peranan Pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi, dan beberapa persoalan Undang² Koperasi.**

Saja akan merasa lebih bergembira lagi djika tjeramah saja ini bisa mendjadi sumbangan, walaupun tidak besar, dalam mendorong dan melantjarkan serta mengembangkan gerakan koperasi, sebagai satu lapangan kegiatan dan perdjuangan dalam menjelesaikan tuntutan² revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

I

TENTANG SUSUNAN EKONOMI INDONESIA JANG HENDAK KITA BANGUN SEKARANG

Dalam perdjuangan untuk mentjapai kemerdekaan nasional jang penuh dan demokratis Rakjat Indonesia telah memperoleh kemenangan². Akan tetapi perdjuangan itu belum selesai. Selama hampir 18 tahun Indonesia Merdeka tjukup melukiskan bahwa perdjuangan menjempurnakan dan mengisi kemerdekaan itu masih berdjalan terus.

Ber-turut² setelah terikat oleh persetudjuan KMB jang merugikan itu, Rakjat Indonesia berdjuang untuk mengusir misi militer Belanda, membatalkan perdjandjian KMB setjara menjeluruh, mengambil-alih dan menasionalisasi perusahaan² Belanda dan sekarang sedang berdjalan taraf terachir daripada perdjuangan pembebasan Irian Barat.

Tidak hanja perdjuangan melawan imperialisme Belanda sadja jang kita lantjarkan jang pada ketika itu merupakan musuh nomor satu daripada Rakjat Indonesia, tetapi djuga melawan imperialisme lainnja jang mau mendjerat Indonesia kedalam djebakan neo-kolonialisme dan perdjuangan melawan musuh² revolusi dalamnegeri, chususnja menghantjurkan kontra-revolusi jang didalangi kaum imperialis. Perdjuangan ini terudjud dalam bentuk perlawanan terhadap usaha² menjeret

Indonesia kedalam SEATO, perlawanan terhadap penanaman modal imperialis jang baru disamping perdjuangan untuk menggerowoti jang masih ada dinegeri kita, perdjuangan menghantjurkan pemberontakan kontra-revolusioner seperti pemberontakan „Darul Islam Kartosuwirjo", „RMS", „PRRI" dan „Permesta", perdjuangan melawan penghisapan tuantanah dan lintah darat di-desa² karena masih bertjokolnja sisa² feodalisme dan perdjuangan melawan kaum komprador imperialis dan kapitalis² birokrat jang menurut istilah Presiden Sukarno pentjoleng² kekajaan negara.

Dengan hal² jang baru saja uraikan ini djelas bahwa tugas² revolusi nasional dan demokratis seperti jang digariskan oleh Manipol **sudah dimulai dan sedang berdjalan** dinegeri kita, jaitu tugas² menghantjurkan rintangan² strategis jang berupa imperialisme dan sisa² feodalisme sebagai sjarat mutlak untuk menudju kepada suatu masjarakat Indonesia jang sosialis dimasa depan.

Dengan keterangan ini saja hendak menekankan tentang pentingnja kita tepat dalam pengertian serta setia melaksanakan dalam praktek apa jang digariskan oleh Presiden Sukarno dalam pidato **Djarek,** bahwa „ada dua tudjuan dan dua tahap Revolusi Indonesia" : **Pertama,** tahap mentjapai Indonesia jang merdeka penuh, bersih dari imperialisme — dan jang demokratis — bersih dari sisa² feodalisme. Tahap ini masih harus diselesaikan dan disempurnakan ..... **Kedua,** tahap mentjapai Indonesia bersih dari kapitalisme dan dari l'exploitation de l'homme par l'homme. Tahap ini hanja bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan dengan sempurna".

Tidak mengerti tentang adanja dua tudjuan dan dua tahap revolusi Indonesia, sama halnja dengan tidak mengerti samasekali revolusi Indonesia. Djustru inilah, menurut Manipol, jang membedakan Revolusi Indonesia sekarang dengan revolusi burdjuis Perantjis tahun 1789 dan dengan revolusi proletar sosialis Rusia tahun 1917.

Dalam perdjuangan untuk mentjapai Indonesia bersih dari imperialisme, perkembangan perdjuangan Rakjat Indonesia telah sampai kepada suatu taraf jang baru. Selama belum ada kepastian penjelesaian menge-

nai masalah Irian Barat, imperialisme Belanda adalah musuh Rakjat Indonesia jang nomor satu, disamping tidak meremehkan bahaja imperialisme Amerika Serikat dan imperialisme lain²nja. Sekarang sudah ada kepastian bahwa imperialisme Belanda akan tamat riwajatnja di Irian Barat, oleh karena itu tidaklah ada artinja lagi menetapkan imperialisme Belanda sebagai musuh pertama. Kekuasaan UNTEA jang masih ada di Irian Barat sekarang adalah lebih mengabdi kepada kepentingan imperialisme Amerika Serikat daripada kepentingan imperialisme Belanda. Oleh karena itu, **musuh Rakjat Indonesia jang nomor satu dan jang paling berbahaja pada waktu sekarang adalah imperialisme Amerika Serikat.** Dilihat dari pengaruh politiknja di Indonesia, dilihat dari segi penanaman modal, dari segi penetrasi militer dan kebudajaan, imperialisme Amerika Serikat mengungguli imperialisme jang lain². Walaupun demikian kewaspadaan harus masih ada terhadap **imperialisme Belanda jang masih merupakan musuh Rakjat Indonesia jang berbahaja,** karena ia masih mempunjai investasi modal jang agak besar, masih akan memadjukan tuntutan² jang tidak masuk akal mengenai perusahaan²nja jang sudah diambil-alih dan dinasionalisasi, masih mempunjai hubungan² politik lama jang akan diusahakan untuk diperbaharui kembali.

Perdjuangan untuk Indonesia jang demokratis, bersih dari sisa² feodalisme, berarti perdjuangan untuk membebaskan kaum tani dari penghisapan tuantanah dan lintahdarat. Dalam pidato Djarek didjelaskan bahwa „melupakan tugas melawan keterbelakangan feodal, berarti tidak membebaskan kaum tani dari penghisapan lintahdarat dan tuantanah, berarti tidak menarik sebagian besar dari Rakjat Indonesia kedalam gerakan revolusi. Djalan ini adalah djalan jang salah, ibarat „orang bertarung memakai satu tangan". Kebangkitan perdjuangan kaum tani Indonesia untuk menuntut tanah garapan, untuk turun sewatanah dan turun bunga pindjaman adalah kebangkitan menudju penghapusan sisa² feodalisme.

Pengalaman menundjukkan bahwa pelaksanaan daripada landreform terbatas berdasarkan Undang² Pokok Agraria dan pelaksanaan UU Perdjandjian Bagi

PER. NAS. R. I.

Hasil tidak selantjar jang kita harapkan. Lagipula pelaksanaan UUPA belum berarti melaksanakan penghapusan samasekali penghisapan feodal terhadap kaum tani, belum berarti melaksanakan landreform jang radikal dan konsekwen dengan menghapuskan samasekali sistim tuantanah. Menurut pengalaman² belakangan ini, djustru ketidak-radikalan dan ketidak-konsekwenan inilah jang mendjadi sumber daripada kematjetan pelaksanaan landreform terbatas berdasarkan UUPA. Kaum tani hanja mau menjambut dengan gairah landreform jang radikal, dan landreform demikian hanja dapat dilaksanakan dimana gerakan tani sudah kuat. Dimana gerakan tani belum kuat, tuantanah mempunjai 1001 akal untuk menjelamatkan diri. Didaerah² dimana gerakan tani belum kuat, tjukup ditekankan pelaksanaan jang konsekwen daripada UU Perdjandjian Bagi Hasil.

Karena jang harus kita bangun sekarang, bukan atau belum sistim ekonomi sosialis, **maka adalah keliru anggapan bahwa kaum kapitalis nasional (pengusaha nasional), apalagi pedagang ketjil adalah musuh revolusi jang harus dihantjurkan dan menganggapnja lebih berbahaja daripada imperialisme.**

Susunan ekonomi jang hendak kita bangun dalam tahap pertama revolusi kita adalah suatu ekonomi nasional jang demokratis, ekonomi anti-imperialis dan anti-feodal, ekonomi terpimpin dan gotongrojong, dimana isinja telah digariskan oleh Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden serta ketetapan MPRS, **jaitu ekonomi sektor negara jang harus semakin dikembangkan dan semakin memegang peranan memimpin seluruh ekonomi negeri, sedangkan ekonomi swasta dari kaum kapitalis nasional (pengusaha nasional) dan ekonomi perseorangan daripada kaum tani (pemilik² tanah) berperanan membantu dan memperkuat ekonomi sektor negara.**

Saudara² tentu akan bertanja, dimana kedudukan daripada koperasi dalam ekonomi nasional demokratis jang hendak kita bangun itu. Koperasi memainkan peranan mengorganisasi pemilik² alat produksi ketjil seperti nelajan, tukang keradjinan tangan dan terutama kaum tani jang telah memiliki tanah² garapan, baik jang dimiliki sebelum dilaksanakan landreform jang

radikal, maupun sebagai hasil dari pembagian tanah jang disita dari tuantanah. Koperasi kaum tani, koperasi pertanian akan merupakan organisasi ekonomi jang membantu meningkatkan taraf hidup kaum tani dan mendorong peningkatan produksi serta memadjukan pertanian.

Perkembangan revolusi kita dewasa ini menetapkan tugas² urgen jang harus kita laksanakan. Beruntunglah bahwa dalam perdjuangan menjelesaikan tugas revolusi itu Rakjat Indonesia telah memiliki aparat revolusi jaitu negara Republik Indonesia dan partai² serta organisasi² massa Rakjat jang telah tergabung dalam Front Nasional. Tugas urgen Rakjat Indonesia telah dengan tepat disimpulkan dalam Pantja Program Front Nasional, jaitu :

1. Mengkonsolidasi kemenangan jang sudah ditjapai, jaitu dibidang perdjuangan Irian Barat, keamanan dan di-bidang² lain.
2. Menanggulangi kesulitan ekonomi dengan mengutamakan kenaikan produksi.
3. Meneruskan perdjuangan anti-imperialisme dan neo-kolonialisme dengan memperkuat kegotongrojongan nasional revolusioner berporoskan NASAKOM.
4. Meratakan dan mengamalkan indoktrinasi 7 bahan pokok indoktrinasi dilengkapi dengan Resopim dan Takem jang memuat „9 Wedjangan" Presiden.
5. Melaksanakan rituling aparatur negara termasuk bidang pemerintahan dari pusat sampai ke-daerah².

Saja berpendapat bahwa poros daripada tugas² urgen ini adalah masalah menanggulangi kesulitan ekonomi **jang hanja dapat dilakukan oleh suatu kekuasaan politik jang mampu mengubah sistim masjarakat dalam negeri, dengan mengutamakan kepentingan majoritet, jaitu Rakjat pekerdja, dan mengorbankan kepentingan minoritet, jaitu tuantanah, kapitalis birokrat dan komprador, dengan mengachiri kekuasaan kaum penghisap besar baik dikota maupun didesa.**

II

TENTANG PERANAN, LAPANGAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI

Diwaktu jang lampau Rakjat kita didjedjali oleh demagogi tentang koperasi jang dilakukan kaum reaksioner. Kita harus menentang propaganda jang menjesatkan dari Dr. M. Hatta jang menjatakan, bahwa „**koperasi adalah satu²nja djalan untuk mentjapai kemakmuran bagi bangsa kita jang masih lemah ekonominja**". Djika dituruti keterangan ini, maka maksud Hatta akan berhasil memindahkan perhatian agar perdjuangan Rakjat tidak ditudjukan kepada melikwidasi kekuasaan kapitalis monopoli imperialis dan sisa² feodalisme di Indonesia.

Pendapat Dr. M. Hatta ini bertentangan linea rekta (langsung) dengan ketegasan daripada Amanat Presiden Sukarno pada Hari Koperasi, 12 Djuli 1962 jang antara lain menjatakan bahwa :

„Kita punja tudjuan bukan sekedar masjarakat kapitalis dengan koperasi, koperasi kaum buruh atau kaum tani didalamnja",

„Kita bukan Soska dan oleh karenanja menolak pandangan Hendrik de Man dalam ‚De psychologie van het socialisme', jang menjatakan : Een lief tuintje voor het huis van een arbeider is meer waard dan al dat gebrul over socialisme en anti-kapitalisme !",

„Kita tegas² menudju kepada sosialisme, tegas² hendak mendjungkir-balikkan dan menghantjur-leburkan kapitalisme, kita dengan tegas hendak menjusun satu masjarakat jang adil dan makmur, tiada didalamnja exploitation de l'homme par l'homme", dan

„Kita tidak mau ‚ons nestelen in het kapitalisme !' "

Ada pula pendapat bahwa koperasi tidak diperlukan sekarang, karena koperasi dibawah sistim masjarakat sekarang toch tidak akan membawa hasil apa² bagi Rakjat. Pendapat ini mengatakan bahwa sebelum selesai revolusi nasional-demokratis jang setjara definitif menghapuskan imperialisme dan sisa² feodalisme, tidak mungkin penghidupan Rakjat diperbaiki dan oleh kare-

na itu pekerdjaan mengorganisasi koperasi² Rakjat tidak ada gunanja.

Pendapat dan sikap ini adalah tidak tepat, karena Rakjat Indonesia sekarangpun sudah menghendaki perbaikan tingkat hidupnja dan karenanja membutuhkan koperasi sebagai salahsatu alat untuk mentjapai perbaikan itu. Walaupun demikian kita tidak boleh berilusi, mengira bahwa koperasi dibawah sistim masjarakat sekarang akan dapat mengatasi krisis ekonomi jang terutama menimpa Rakjat pekerdja.

Koperasi mempunjai dua segi positif jang harus kita kembangkan. **Pertama,** koperasi dapat mempersatukan Rakjat pekerdja menurut lapangan penghidupannja masing² dan dapat menghambat proses diferensiasi atau ter-petjah²nja produsen² ketjil; djadi koperasi mempunjai unsur mempersatukan, jaitu mempersatukan Rakjat jang lemah ekonominja. Dengan persatuan dan kerdjasama Rakjat pekerdja dapat berusaha mengurangi penghisapan tuantanah, lintahdarat, tukang idjon, tengkulak dan kapitalis² atas diri mereka. Kemampuan koperasi dibawah sistim masjarakat dan sjarat² kapitalisme memang terbatas pada mengurangi penghisapan² bukan pada menghapuskannja, karena penghapusan penghisapan itu adalah tugas dari revolusi kita pada tahap jang kedua jang bertudjuan „mentjapai Indonesia bersih dari kapitalisme dan dari ‚l'exploitation de l'homme par l'homme' " (Djarek). **Kedua,** koperasi djuga dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, jang berarti dapat menambah penghasilan atau pendapatan terutama bagi para angotanja. Dan jang merupakan segi jang penting lagi adalah bahwa pengalaman² Rakjat dalam hidup berkoperasi sekarang akan sangat berguna bagi kehidupan koperasi² tingkat tinggi, jaitu koperasi² jang bersifat sosialis dimasa jang akan datang.

Antara koperasi dibawah kapitalisme dan koperasi jang bersifat sosialis terdapat perbedaan jang besar. Perbedaan itu antara lain terlihat dalam hubungan hakmilik. Dalam koperasi jang bersifat sosialis, misalnja koperasi produksi pertanian, tanah dan alat² produksi lainnja jang pokok adalah milik kolektif, milik dari koperasi jang bersangkutan, keadaan mana tidak mungkin terdapat dalam koperasi dibawah kapitalisme. Pengkoperasian serupa itu hanja mungkin terdjadi se-

sudah perubahan tanah (landreform) selesai seluruhnja. Usaha inipun perlu dilakukan ber-tingkat² sesuai dengan tingkat kesedaran kaum tani, dan harus atas dasar sukarela, tidak boleh dipaksakan. **Tingkat pertama,** misalnja, dibentuk dikalangan kaum tani organisasi saling membantu dalam produksi pertanian. Organisasi ini sudah mengandung bibit² Sosialisme. **Tingkat kedua,** diorganisasi koperasi produksi pertanian jang bersifat setengah sosialis, jaitu koperasi pertanian tingkat rendah, tanah dimasukkan sebagai saham, karena tanah dan alat² produksi lainnja masih merupakan milik perseorangan. **Tingkat ketiga,** jalah dibentuknja koperasi tingkat tinggi jang bersifat sosialis, dimana tanah dan alat² produksi lainnja jang pokok sudah diubah dari milik perseorangan mendjadi milik kolektif.

Sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/1960, watak atau sifat pembangunan ekonomi jang disusun dalam pola pembangunan nasional semesta, adalah **merupakan pembangunan masa peralihan.** Ada jang menafsirkan bahwa peralihan jang dimaksud disini adalah peralihan ke Sosialisme. Sudah tentu penafsiran ini tidak tepat. Bagaimana kita mungkin melakukan pembangunan masa peralihan ke Sosialisme, sedangkan ekonomi imperialis dan ekonomi feodal masih bertjokol dinegeri kita, artinja revolusi nasional-demokratis belum selesai. Pembangunan ekonomi masa peralihan jang dimaksud oleh Ketetapan MPRS itu adalah peralihan dari ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional, peralihan untuk menudju suatu susunan ekonomi jang nasional-demokratis, bebas dari imperialisme dan sisa² feodalisme. Dalam masa peralihan itu bidang ekonomi sektor negara harus dikembangkan sehingga berkedudukan komando dalam ekonomi negeri, sedang ekonomi swasta nasional dan koperasi supaja melakukan peranan membantu dan memperkuat ekonomi sektor negara. Watak ekonomi masa peralihan ini adalah progresif.

Dengan demikian djelaslah bahwa watak daripada koperasi jang dikehendaki oleh Ketetapan MPRS serta dengan pedoman politik Manipol adalah bukan koperasi kapitalis dan djuga bukan atau belum koperasi sosialis, karena sjarat²nja untuk itu belum ada, melainkan koperasi progresif. Tegasnja kita harus mendjaga dan mentjegah supaja koperasi itu tidak berkembang

mendjadi badan² kapitalis jang digunakan oleh kaum kapitalis, tanikaja atau tuantanah untuk menghisap Rakjat pekerdja. Koperasi progresif harus bisa mendjadi sendjata ditangan Rakjat pekerdja untuk melawan penghisapan tuantanah, lintahdarat dan kapitalis. Dengan keterangan ini djelaslah bahwa dua ketjenderungan dalam gerakan koperasi harus dikalahkan. **Pertama,** ketjenderungan **kekiri-kirian,** kena penjakit kanak² dalam revolusi, menganggap bahwa koperasi jang kita bentuk sekarang adalah koperasi sosialis dan sekarang djuga menuntut penghapusan kapitalis nasional, termasuk pedagang ketjil, halmana tidak sesuai dengan taraf revolusi kita sekarang jang memerlukan pemaduan seluruh kekuatan nasional untuk mengarahkan pukulan pada sasaran strategis jaitu imperialisme dan sisa² feodalisme, atau sekarang kongkritnja kaum penghisap besar dikota dan desa jaitu kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah. **Kedua,** ketjenderungan **kekanan,** dimana koperasi² mendjadi tempat atau mendjalankan praktek² kapitalis. Hal ini bisa terdjadi adalah karena seperti pernah saja kemukakan dalam sambutan saja pada Musjawarah Pembiajaan Koperasi di Tjipajung beberapa bulan jang lalu, jaitu karena koperasi di Indonesia sekarang ini bergerak ditengah² struktur kemodalan dimana terdapat ekonomi sektor negara jang semakin kuat, terdapat ekonomi sektor swasta nasional dan ekonomi sektor swasta asing monopoli serta ekonomi feodal didesa. Karena itu tidak heran djika kehidupan gerakan koperasi kita dipengaruhi oleh kegiatan² daripada struktur kemodalan ini.

Adalah perlu mendapat perhatian dan harus ditjegah bahwa elemen kapitalis dengan bersembojan „untuk sosialisme Indonesia" menjelundup kedalam gerakan koperasi, berdjubah koperasi, mendjalankan praktek² kapitalis atas nama koperasi, atas nama anggota² koperasi jang terdiri daripada Rakjat pekerdja. Kita tidak menentang kaum kapitalis nasional jang benar² nasional, tetapi kita menentang djika mereka mensalahgunakan nama koperasi untuk melepaskan diri dari pembajaran ber-matjam² padjak kepada negara dan untuk merampas fasilitet² jang seharusnja hanja didapat oleh koperasi.

Dasar koperasi pada pokoknja jalah **kerdjasama an-**

tara mereka jang lemah ekonominja, agar dengan bersatu dan saling bantu mentjapai perbaikan tingkat hidup. Orang² jang mempunjai kepentingan jang bersamaan berhimpun dalam suatu koperasi atas dasar sukarela. Sjarat kepentingan jang bersamaan dan dasar sukarela ini perlu diperhatikan dalam mengorganisasi suatu koperasi.

Dalam satu koperasi kredit umpamanja adalah keliru djika dihimpun lintahdarat dan tanimiskin ber-sama², karena kepentingan mereka sangat berbeda, bahkan bertentangan.

Kepentingan jang berbeda dan jang bertentangan daripada tuantanah, tanikaja, tanisedang, tanimiskin dan buruhtani djuga tidak bisa dipersatukan dalam satu koperasi pertanian.

Kepentingan jang berbeda dan bertentangan daripada pengusaha, tukang keradjinan tangan jang merupakan pekerdja merdeka dan buruh keradjinan tangan tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi keradjinan tangan.

Kepentingan jang berbeda dan bertentangan daripada pengusaha² pemilik alat produksi industri, pekerdja-merdeka dalam industri rumah-tangga dan buruh industri tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi industri.

Kepentingan jang berbeda dan bertentangan daripada pengusaha penangkapan ikan, tengkulak, djuragan pemilik alat perikanan, nelajan sedang, nelajan miskin dan buruh nelajan tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi perikanan atau koperasi nelajan.

Kepentingan jang berbeda dan bertentangan daripada pengusaha peternakan dan buruh peternakan tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi peternakan.

Pedagang jang mengumpulkan produksi pertanian (collecterende handel), tengkulak dan tanikaja, tanisedang serta tanimiskin produsen tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi pendjualan bersama hasil pertanian.

Djika diorganisasi dalam satu koperasi orang² atau lapisan² Rakjat jang kepentingannja berbeda atau bahkan bertentangan, koperasi itu dalam praktek pasti akan hanja menguntungkan orang² atau lapisan² Rak-

jat jang ekonominja lebih kuat dan merugikan, bahkan bisa menindas setjara kedjam orang² atau lapisan² Rakjat jang ekonominja lemah.

Saja hendak memberi satu ilustrasi tentang tidak mungkinnja orang² jang berbeda atau bertentangan kepentingannja diorganisasi dalam satu koperasi dari pengalaman praktis beberapa tahun jang lalu didaerah Purwokerto. Disalahsatu desa didaerah tersebut dibentuk satu koperasi desa jang bergerak dibidang kredit atau simpan-pindjam. Semua penduduk desa dianggap otomatis djadi anggota koperasi. Untuk modal pertama diambil dari hasil keuntungan pendjualan gula distribusi kepada penduduk dan untuk modal tambahan dari uang tabungan para anggota. Golongan jang beruang, jaitu tuantanah, tanikaja, lintahdarat, tengkulak dan orang² berada lainnja „menabung" dalam koperasi itu. Setiap anggota boleh memindjam dengan bunga 10% dalam 35 hari, artinja 104% setahun. Pengurus koperasi sebagian besar terdiri dari golongan² pemeras. Terhadap pemindjam dari kalangan tanisedang dan tanimiskin pengurus bersikap keras, kadang² dengan menggunakan intimidasi. Karena takut kena perkara, banjak pemindjam jang mendjual rumah, pekarangan dan pohon buah²an atau menggadaikan sawahnja dengan harga murah untuk melunasi pindjamannja. Barang² itu umumnja djatuh ketangan tuantanah, tanikaja dan lintahdarat jang diantaranja djuga mendjadi pengurus „koperasi".

Saja kira masih banjak tjontoh tentang koperasi jang berkeanggotaan orang² jang bertentangan kepentingannja, jang dalam praktek tidak beda kegiatannja daripada badan² kapitalis, bahkan kadang² lebih busuk daripada itu. Apalagi djika koperasi² itu pembentukannja tidak demokratis dan pengurusnja main tundjuk dari atas, misalnja dilapangan pengumpulan dan pendjualan hasil² produksi pertanian untuk perdagangan baik dalamnegeri maupun untuk ekspor, kaum produsen jang mendjadi „anggota" diharuskan menjerahkan produksinja kepada „koperasi" sehingga koperasi mendjadi "single buyer", dengan harga jang lebih rendah daripada djika didjualnja setjara bebas. Dengan tjara ini bukan sadja tidak tertjapai maksud berkoperasi daripada para produsen jaitu untuk mendapatkan nilai

tukar daripada produksinja jang lebih tinggi, melainkan kebalikannja, nilai tukar daripada produksinja itu mendjadi merosot, sedang pengurus² koperasi dimungkinkan untuk bermanipulasi dengan barang² jang dikuasainja.

Djuga djelas bahwa pengaruh djahat kaum kapitalis birokrat jang bisa berhubungan dengan gerakan koperasi telah mendorong sementara gerakan koperasi kita kedjurang jang bertentangan dengan kepentingan anggota²nja dan kepentingan Rakjat pada umumnja.

Dalam mengembangkan gerakan koperasi **perhatian kita harus ditudjukan kepada lapisan terbesar dari massa Rakjat pekerdja, jaitu kaum tani** jang djumlahnja 60-70% dari penduduk Indonesia dan jang masih berada dibawah penghisapan² tuantanah, lintahdarat dan kaum kapitalis. Dari kalangan kaum tani ini jang paling tepat diorganisasi dalam koperasi² adalah tanisedang dan tanimiskin, karena mereka masih mempunjai tanah atau sedikit tanah dan alat² pertanian. Koperasi daripada kaum tanisedang dan tanimiskin bisa berbentuk koperasi kredit atau simpan-pindjam untuk melepaskan mereka dari tjengkeraman tukang² idjon dan lintahdarat, koperasi produksi untuk meningkatkan produksi pertanian mereka dan koperasi djual-beli untuk mendapatkan pasar jang baik bagi barang² produksi pertanian mereka (cooperative marketing) dan sekaligus untuk dapat membeli bahan² keperluan mereka seperti bibit, pupuk, alat² pertanian dsb., djuga barang² kebutuhan konsumsi.

Multipurpose cooperative (koperasi serba-usaha) bagi kaum tani adalah tepat, tetapi untuk mentjegah kegagalan² jang bisa mengetjewakan dan membikin kapok kaum tani berkoperasi, baik langkah² permulaan dimulai dari koperasi kredit dan seterusnja dikembangkan bentuk² lain, setelah mendapatkan pengalaman² jang diperlukan.

Koperasi dikalangan kaum tani seperti halnja koperasi² lainnja banjak jang mengalami kegagalan. Sebabnja adalah, bahwa disamping mendapat tekanan dari tuantanah dan lintahdarat dan modal monopoli asing, kurang mendapat bantuan Pemerintah, djuga karena koperasi² itu dipimpin oleh elemen² jang korup, jang tidak djudjur dan tidak tjakap. Karena itu masalah

memilih pimpinan jang djudjur, tjakap dan Manipolis adalah penting dalam koperasi.

Saja berpendapat bahwa tenaga² pemuda dan wanita adalah efektif bila ditarik kedalam kegiatan koperasi. Pemuda mempunjai kesanggupan bekerdja jang lebih besar dan kedjudjurannja berguna untuk mentjegah praktek² korupsi jang mungkin terdjadi. Kaum wanita jang pada umumnja lebih tjermat dan teliti itu akan mendorong koperasi bekerdja baik.

Dalam hubungan dengan pengembangan koperasi pertanian, adalah tepat apa jang pernah diutjapkan Sdr. Menteri Koperasi, bahwa **landreform adalah sjarat mutlak bagi perkembangan koperasi pertanian dan bagi mempertinggi produksi.**

Kaum buruh dan pegawai negeri djuga membutuhkan koperasi. Karena nilai upah atau gadji jang makin merosot, kaum buruh dan pegawai negeri berkepentingan untuk mendapat barang² keperluan hidup se-hari² dengan harga murah. Karena itu djenis koperasi konsumsi bisa menolong mereka. Koperasi simpan-pindjam djuga menarik kaum buruh dan pegawai negeri, untuk mendapatkan kredit membangun perumahan, membeli speda, speda motor, alat² perabot rumah, keperluan kenduri dsb.nja.

Dengan dibentuknja koperasi konsumsi bagi kaum buruh dan pegawai negeri, tidaklah berarti bahwa madjikan atau perusahaan dan Pemerintah lepas tanggungdjawab atau sebagian tanggungdjawab mengenai pemeliharaan dan djaminan sosial kaum buruh dan pegawai negeri. Tanggungdjawab pemeliharaan dan djaminan sosial kaum buruh dan pegawai negeri adalah sepenuhnja ditangan madjikan atau perusahaan dan Pemerintah.

Kaum keradjinan tangan dan kaum nelajan memerlukan pula organisasi koperasi agar mereka dengan teratur dan dengan harga jang pantas, mendapatkan bahan² dan alat² untuk bekerdja dan agar hasil pekerdjaan mereka tidak djatuh ketangan tengkulak sehingga harganja sangat murah.

Koperasi nelajan jang ada sampai sekarang ternjata kebanjakan tidak menolong para nelajan jang bekerdja, sebab koperasi itu hakekatnja adalah organisasi dari-

pada djuragan² perahu dan pawang² ikan jang tidak bekerdja.

Praktek daripada beberapa koperasi keradjinan tangan, misalnja koperasi kulit, membuktikan bagaimana madjikan kulit mensalahgunakan nama koperasi. Beberapa madjikan berkumpul mendirikan „koperasi", semua buruh jang bekerdja dalam perusahaan² mereka didaftar mendjadi anggota tanpa mereka ketahui. Dengan demikian „koperasi" itu mendapatkan fasilitet, termasuk kredit dari Pemerintah. Sesudah „koperasi" itu besar lalu oleh madjikan itu diubah mendjadi Jajasan.

Kaum miskin kota membutuhkan koperasi konsumsi jang dapat meringankan beban hidup mereka, dengan mendapatkan barang² konsumsi melalui koperasi² dengan harga jang murah.

Kaum pedagang ketjil sangat membutuhkan kredit dan kesempatan membeli barang² dagangan tanpa melewati tengkulak² dan tukangtjatut². Mereka memerlukan koperasi kredit atau simpan-pindjam dan koperasi pembelian bersama.

Dari keterangan saja ini jang mendjelaskan bahwa kaum tani, kaum buruh dan pegawai negeri, kaum keradjinan tangan dan nelajan, kaum miskin kota dan kaum pedagang ketjil membutuhkan organisasi koperasi, terbentang lapangan jang luas bagi kegiatan gerakan koperasi, lapangan kegiatan jang hanja mungkin dihadapi dengan ketekunan, ketjakapan dan kedjudjuran daripada kader² atau aktivis² gerakan koperasi kita.

Dari pengalaman tentang kepentingan berkoperasi dari berbagai lapisan Rakjat, dapat disimpulkan bahwa tiga bentuk koperasi adalah jang paling dibutuhkan, jaitu koperasi **kredit, produksi** dan **konsumsi** atau koperasi djual-beli bagi kaum tani.

Mengembangkan koperasi produksi dan konsumsi sepenuhnja adalah sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/1960 bidang produksi dan distribusi jang menjatakan, bahwa daja produksi harus dikembangkan dengan mengerahkan segenap modal dan potensi (funds and forces) dalamnegeri dimana kaum buruh dan kaum tani memegang peranan jang penting, dan bahwa dalam mengatur dan menjalurkan distribusi bahan² keperlu-

an hidup Rakjat, koperasi² harus diikutsertakan disamping RT/RK dan swasta nasional.

Akan tetapi walaupun lapangan kegiatan koperasi luas dan bila berkembang akan mengorganisasi djumlah penduduk jang besar, haruslah dimengerti dengan djelas bahwa peranannja dalam ekonomi negeri, bersamaan dengan peranan ekonomi swasta nasional, adalah membantu untuk memperkuat sektor ekonomi negara. Gerakan koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi tidak mungkin berkembang, lebih² dalam masa peralihan menudju ekonomi nasional-demokratis, djika tidak dihubungkan dengan perdjuangan melawan praktek lintahdarat, tuantanah, tengkulak besar dan pentjoleng. Gerakan koperasi tidak mungkin mempunjai perspektif tanpa bimbingan, perlindungan dan bantuan ekonomi sektor negara.

Dari tjatatan² Djawatan Koperasi Pusat saja dapati perkembangan Organisasi koperasi dinegeri kita sekarang sbb. :

Djumlah koperasi primer dan kekuatannja (achir triwulan 1961) :

1. Djumlah 34.780 primer.
2. Djumlah anggota: 6.332.368 orang.
3. Djumlah simpanan pada koperasi : Rp.1.629.105.814,74
4. Djumlah perputaran Rp. 5.511.777.048,69.
5. Djumlah dana tjadangan Rp. 153.672.298,71.

Perbandingan djenis² koperasi (achir triwulan 1961) adalah sbb. :

1.	Serbausaha	40,1%
2.	Pertanian	7,5%
3.	Peternakan	0,3%
4.	Keradjinan dan industri	2,6%
5.	Simpan-pindjam	21,1%
6.	Konsumsi	24,3%
7.	Perikanan	1,2%
8.	Lain-lain	2,1%

Dari angka² ini dapat dikatakan bahwa setjara umum dinegeri kita sekarang terdapat kemadjuan dalam djumlah koperasi, djumlah anggotanja, djumlah uang jang dikumpulkan dari anggotanja, perputaran

dan dana tjadangan. Kemadjuan dalam djumlah koperasi primer dapat dibuktikan oleh perkembangan 3 kali lipat dalam djumlah pada tahun 1961 dibandingkan dengan pada achir tahun 1958.

Dalam pada itu suatu perbandingan jang menjolok tentang kekuatan modal koperasi menundjukkan, bahwa koperasi keradjinan (terutama batik) jang hanja berdjumlah kurang dari 3% dari seluruh djumlah koperasi memiliki 43% dari seluruh modal koperasi. (Keterangan pers dari Sdr. Kepala Djawatan Koperasi).

Mengenai perbandingan djenis koperasi menundjukkan bahwa koperasi pertanian jang seharusnja merupakan bagian jang terbesar, mengingat besarnja djumlah desa[2] dan djumlah kaum tani jang seharusnja mendjadi sasaran utama pengorganisasian dalam koperasi, ternjata hanja 7,5% dari seluruh primer. Kenjataan ini harus mendorong kita untuk memberikan perhatian jang lebih besar kepada pembentukan koperasi[2] pertanian dimasa depan. Tetapi seperti sudah saja djelaskan tadi, kuntji perkembangan koperasi pertanian adalah penjelesaian landreform, bukan hanja landreform terbatas seperti jang dilaksanakan dengan sangat lambatnja sekarang, tetapi landreform jang radikal, jang menghapuskan samasekali penghisapan tuantanah, mensita tanah[2] tuantanah dan membagikannja kepada kaum tani, terutama kepada tanimiskin dan buruhtani.

Selandjutnja perkembangan gerakan koperasi adalah tergantung dan tidak dapat dipisahkan daripada perkembangan revolusi. Penjelesaian tuntutan[2] revolusi Agustus '45 sampai ke-akar[2]nja, suatu kemenangan revolusi nasional-demokratis adalah suatu sjarat bagi perkembangan koperasi[2] progresif untuk kemudian mendjadi koperasi[2] sosialis. Karena itu gerakan koperasi walaupun ia adalah non-partai tidak boleh terpisah daripada kegiatan[2] politik revolusioner.

Gerakan Koperasi kita adalah gerakan jang mendukung dan memperdjuangkan Manipol, karenanja gerakan koperasi kita harus mendjadi alat pemersatu Rakjat, dan oleh karenanja harus bebas daripada berbagai phobi, terutama Nasakom-phobi. Didalam gerakan koperasi kader[2] atau aktivis[2] Nasakom harus bersatu dan ber-lomba[2] bekerdja baik bagi kepentingan massa anggota koperasi dan massa Rakjat.

III

TENTANG PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN GERAKAN KOPERASI DAN BEBERAPA PERSOALAN UU KOPERASI

Berdasarkan pengalaman perkembangan gerakan koperasi selama ini sangat dirasakan perlunja diperbesar peranan Pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi, setjara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan koperasi tidak dapat dilihat hanja dari sudut besar-ketjilnja djumlah kredit jang dikeluarkan oleh Pemerintah dan dalam membentuk atau menghidupkan koperasi.

Karena gerakan koperasi tidak terlepas daripada struktur ekonomi dalam masjarakat kita sekarang, maka sedjalan dengan usaha mengembangkan koperasi dikalangan Rakjat, Pemerintah harus melaksanakan dengan konsekwen garis[2] Manipol dan MPRS dengan mengadakan pengubahan sistim masjarakat Indonesia melikwidasi kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah, sebagai sjarat mutlak dalam menanggulangi kesulitan ekonomi.

Kehidupan gerakan koperasi tidak mungkin berkembang sehat djika kesulitan[2] ekonomi dewasa ini tidak dapat diatasi. Sesuai dengan Pantja Program Front Nasional poros dalam mengatasi kesulitan ekonomi adalah masalah mempertinggi produksi, sedang dalam mempertinggi produksi kaum buruh dan kaum tani adalah tenaga pokoknja. Hanja dengan memberikan kebebasan demokratis kepada kaum buruh dan kaum tani, melaksanakan social-support dan social-control dalam ekonomi, chususnja dalam produksi, dengan memperbaiki sjarat[2] materiil kehidupan kaum buruh dan kaum tani, akan bangkit antusiasme jang tinggi untuk berproduksi.

Kestabilan moneter sebagai faktor penting dalam melantjarkan pembangunan seperti jang ditetapkan MPRS tidak mungkin ditjapai dengan tindakan finansiil moneter semata. Kestabilan moneter tergantung kepada perkembangan produksi dan sebaliknja keuangan jang gontjang setjara timbalbalik mengatjaukan

produksi. Ini berarti jang diperlukan adalah politik keuangan jang mengabdi kepada produksi dan bukannja produksi harus mendjadi korban politik keuangan jang salah jang tidak berorientasi kepada produksi dan perbaikan taraf hidup Rakjat. Tindakan pemerintah untuk menguasai ekspor bahan² penting, menjesuaikan impor dengan rentjana pembangunan dalamnegeri, mentjegah kenaikan jang makin menggila dari harga² kebutuhan pokok Rakjat, mendjadikan PN² dan PDN² sumber jang pokok daripada pemasukan keuangan negara, peningkatan produksi sandang-pangan (terutama pangan, chususnja beras), kesemuanja ini adalah merupakan faktor jang penting dalam usaha mengembangkan pembentukan dan kehidupan koperasi dinegeri kita.

Kehidupan koperasi djuga tergantung kepada djaminan fasilitet² atau kelonggaran² dari Pemerintah untuk mendapatkan barang², pemberian order², keringanan² padjak, bantuan finansiil berupa kredit atau subsidi, mengusahakan pendidikan untuk petugas² koperasi atas biaja Pemerintah dan sebagainja.

Dengan mengintensifkan peranan Pemerintah itu, akan dapat diusahakan adanja perbaikan² materiil sekarang djuga bagi anggota² koperasi, sekalipun masih terbatas.

Peranan Pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi dan perkembangan koperasi itu sendiri sangat erat hubungannja dan diatur dalam UU Koperasi serta peraturan² pelaksanaannja. Pada waktu ini gerakan koperasi dibentuk dan bergerak dengan UU No. 79/1958 Tentang Perkumpulan Koperasi dan PP No. 60/1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Saja berpendapat bahwa dalam batas² tertentu UU dan PP ini telah lebih mendorong perkembangan gerakan koperasi, djika kita bandingkan dengan sebelum adanja UU dan PP ini. Beberapa perhatian terhadap bagian² daripada UU 79/58 dan PP 60/59 itu diperlukan, dan djika dimasa depan dapat dilakukan perbaikan²nja, akan lebih memungkinkan perkembangan gerakan koperasi jang lebih pesat dinegeri kita.

Hal² jang saja maksudkan itu antara lain adalah :

1. Mengenai definisi jang termuat dalam Bab I tentang ketentuan² umum dan azas koperasi (pasal 2 dan 3 UU 79/58).

PER. NEG. R. I.

2. Tentang lapangan usaha jang mendjadi sasaran koperasi (pasal 6 UU 79/1958 dan pasal 2 PP 60/1959).
3. Mengenai prinsip² demokrasi dalam organisasi koperasi.
4. Mengenai peranan Pemerintah dalam gerakan koperasi.
5. Mengenai daerah bekerdja koperasi.

1. Mengenai definisi

Definisi tentang koperasi seharusnja sesuai dengan djiwa koperasi jang biasa dimiliki oleh Rakjat pekerdja di Indonesia dan diseluruh dunia. Sudah mendjadi pengertian umum bahwa perkataan koperasi berarti kerdjasama, sedang koperasi sebagai satu sistim berarti sedjumlah orang mengadakan perkumpulan untuk memungkinkan setjara kerdjasama mentjapai hasil² jang lebih menguntungkan daripada kalau dikerdjakan sendiri² oleh orang² itu. Ditindjau setjara ekonomis hal ini adalah logis dan sesuai pula dengan semangat gotong-rojong jang didjadikan ukuran pokok dalam undang² koperasi sekarang untuk menentukan apakah koperasi itu sesuai atau tidak dengan keadaan di Indonesia. Djelasnja jang harus mendapat perhatian adalah diperlukannja **perumusan jang tegas mengenai perbedaan koperasi dengan badan² ekonomi kapitalis seperti NV (PT), Firma atau lainnja.**

Besar ketjilnja modal koperasi tergantung kepada djumlah atau keluar masuknja anggota, sedang djumlah modal NV (PT), Firma dan badan² kapitalis lainnja ditentukan setjara hukum dan dengan modal itu badan² tersebut melakukan penghisapan terhadap tenaga² kerdja. Dalam UU 79/1958 memang telah tertjantum perumusan bahwa koperasi „tidak merupakan konsentrasi modal" atau dalam PP 60/1959 dirumuskan „bukan perkumpulan modal". Dengan perumusan ini definisi koperasi setjara pokok telah terdapat kemadjuan. Sekalipun demikian di-bagian² lain daripada UU Koperasi ini, masih terdapat perumusan² jang sangat umum, samar², jang mudah dapat disalahgunakan dalam praktek, sehingga bisa bertentangan dengan djiwa dan maksud jang murni daripada koperasi.

Sebagai hasil penjelidikan jang luas dberbagai negeri setjara internasional telah dapat dirumuskan definisi tentang koperasi jang meliputi 4 prinsip pokok jaitu :

a. Ia adalah perkumpulan orang^2 dan bukan kapital.
b. Anggota^2 perkumpulan itu mempunjai haksama, peraturan jang berlaku adalah satu anggota satu suara.
c. Masuk-keluar perkumpulan adalah sukarela.
d. Perkumpulan mempunjai tudjuan dimana anggota^{2}nja mempunjai kepentingan bersama dan pelaksanaannja memerlukan bantuan dari masing^2 anggota.

Koperasi tidak didirikan dengan tudjuan mengedjar keuntungan (winstbejag) seperti perusahaan^2 kapitalis, tetapi berdasarkan maksud untuk ber-sama^2 meringankan beban anggota^2.

Mengenai 4 prinsip pokok itu memang sudah terkandung dalam UU 79/1958 dan PP 60/1959. Menetapkan definisi^2 jang dengan tegas membedakan koperasi daripada badan^2 ekonomi kapitalis adalah penting untuk mentjegah penjelewengan^2.

2. Lapangan usaha Koperasi

Lapangan usaha jang mendjadi sasaran koperasi perlu diteliti mana jang paling sesuai dengan kepentingan golongan^2 massa Rakjat sekarang. Undang^2 Koperasi merumuskan lapangan usaha koperasi jang akan menentukan djenis koperasi, setjara terlalu luas, tidak djelas dan diluar kebiasaan dan kemungkinan jang dapat ditjapai oleh koperasi. Saja berpendapat djika lapangan bergerak koperasi jang lazim dialami selama ini diperhebat dan diintensifkan dengan bantuan Pemerintah maka manfaatnja akan dapat dilihat dan dirasakan oleh anggota koperasi dan masjarakat umumnja. Tentunja hasil^2 itu masih sangat terbatas, sebelum ditjapai pengubahan struktur ekonomi sekarang.

Ketentuan jang terlalu luas dan umum tentang lapangan usaha koperasi akan dapat mendjadi saluran

pula bagi penjelewengan² jang akan merusak maksud dan tudjuan jang sebenarnja daripada Koperasi seperti jang terdjadi sekarang dengan GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) jang sebenarnja adalah organisasi kapitalis² batik. Pendjenisan setjara definitif jang dirumuskan oleh PP 60/1959 fasal 2 memang telah mentjegah kekaburan dan terlalu luasnja lapangan usaha. Tetapi dengan penetapan keanggotaan daripada djenis² koperasi jang **tidak hanja berdasarkan kepentingan² jang bersamaan sadja, melainkan djuga jang mempunjai kepentingan² jang satu sama lain ada sangkut pautnja setjara langsung,** maka ini berarti terlalu luas, dan boleh dibilang tidak ada batasnja. Ini berarti menjatukan orang² jang berbeda dan bahkan bertentangan kepentingannja dalam satu organisasi ekonomi, dan ini tidak bisa mengakibatkan praktek lain, ketjuali jang kedudukan ekonominja lemah akan mendjadi korban daripada jang kuat.

Dalam pendjelasan PP 60/1959 dikemukakan bahwa dengan ketentuan itu „dogma pertentangan buruh madjikan jang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bisa dihindarkan didalam perkumpulan Koperasi".

Saja berpendapat bahwa penjelesaian masalah pertentangan buruh dengan madjikan bukanlah dengan djalan penjatuan formil jang tidak menghapuskan hakekat perbedaan dan pertentangan klas, melainkan didalam taraf revolusi nasional dan demokratis sekarang ini antara madjikan (pengusaha nasional) dengan kaum buruh diperlukan saling pengertian dalam semangat front persatuan nasional melawan musuh² revolusi, jaitu imperialisme dan feodalisme.

Adapun penjelesaian jang prinsipiil daripada perbedaan klas dan pertentangan kepentingan madjikan dan buruh terletak pada tingkat selandjutnja daripada revolusi kita, jaitu tahap kedua daripada revolusi dengan pengubahan sosialis daripada ekonomi negeri dan penghapusan penghisapan atas manusia oleh manusia.

3. Mengenai prinsip demokrasi daripada Koperasi

Ada salahsatu fasal jaitu fasal 22 UU 79/1958 jang mengatur tentang kekuasaan tertinggi dalam organi-

sasi koperasi. Dinjatakan setjara tepat bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Tetapi pada fasal lain terdapat perumusan jang bertentangan dengan fasal ini, jang memberi hak istimewa kepada pedjabat untuk memutuskan pembubaran Koperasi. Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan kekuasaan tertinggi jang ada pada rapat anggota. Tindakan pedjabat terhadap organisasi tidak boleh tanpa batas. Ia harus mengindahkan ketentuan² organisasi koperasi dan menghormati keputusan² rapat² anggota dan badan pimpinan koperasi.

Dalam sambutan saja kepada Musjawarah Pembiajaan Koperasi di Tjipajung telah saja kemukakan, supaja gerakan koperasi bisa tumbuh sebagai pohon diudara bebas dan djangan seperti „kamerplant" (tanaman penghias kamar) jang hidup karena disirami terus-menerus, artinja gerakan koperasi supaja tumbuh setjara wadjar dan demokratis serta tidak menggantungkan diri kepada bantuan se-mata².

Bantuan dari Pemerintah dan bantuan dari luar lainnja kepada gerakan koperasi harus bersifat bimbingan jang membantu perkembangan gerakan koperasi. Pada waktu achir² ini satu gedjala jang tidak baik dalam pembentukan beberapa djenis koperasi, adalah pembentukan jang ter-gesa² atas dasar instruksi dari atas. Saja berpendapat bahwa tjara pembentukan koperasi demikian adalah tidak sehat, jang pasti akan mengakibatkan ekses². Peranan pimpinan dan inisiatif dari atas adalah sebagai pendorong, tetapi ia harus dipadukan dengan pertumbuhan jang objektif dari gerakan koperasi itu dari bawah jang mendapat dukungan massa setjara sukarela dan demokratis.

4. Mengenai Peranan Pemerintah Dalam Gerakan Koperasi

Mengenai peranan Pemerintah dalam gerakan koperasi perlu dengan djelas ditetapkan. Pada waktu sekarang ini peranan Pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi adalah menentukan. Usaha mengembangkan gerakan koperasi memang tidak dapat dipisahkan daripada usaha Pemerintah memperbaiki ke-

adaan ekonomi dalam negeri, dalam menanggulangi kesulitan ekonomi dewasa ini.

Peranan Pemerintah dibuktikan oleh semakin besarnja perhatian Presiden Sukarno kepada pengembangan gerakan koperasi sebagai salahsatu alat pemersatu Rakjat dalam penjelesaian revolusi kita. Dibentuknja chusus suatu Departemen Koperasi menundjukkan perspektif jang penting masalah pengkoperasian dinegeri kita.

Adalah keliru apabila persoalan perkembangan gerakan koperasi hanja terletak pada sjarat pengesahan suatu koperasi sebagai badan hukum, jang merupakan bagian jang menondjol daripada UU 79/1958. Pemerintah harus setjara aktif membimbing dan membantu gerakan koperasi. Dalam Undang² Koperasi perlu dengan tegas dirumuskan fasal² tentang djaminan fasilitet, djaminan pasar dan barang² jang diperlukan oleh Koperasi, disamping fasal² lain jang sudah menetapkan setjara umum kewadjiban Pemerintah untuk membantu dan melindungi koperasi. Kredit² Pemerintah kepada koperasi harus diberikan setjara zakelijk sesuai dengan kemampuan dan keadaan organisasi koperasi jang bersangkutan.

Anggapan bahwa Pemerintah tidak usah turut tjampur samasekali dalam gerakan koperasi adalah tidak tepat. Dibalik sikap jang demikian ada terdapat maksud jang liberal, bahkan didorong oleh maksud² jang menjimpang daripada djiwa dan tudjuan koperasi. Sebaliknja hak tjampur tangan pedjabat Pemerintah jang terlalu banjak seperti terdapat dalam UU Koperasi sekarang, sampai bisa membubarkan koperasi dan sebagainja, akan memberi kemungkinan pensalahgunaan hak²nja oleh pedjabat jang tidak baik.

5. Daerah Kerdja Koperasi

Dalam pasal 5 ajat (2) UU Koperasi ditetapkan bahwa dalam satu daerah kerdja tertentu pada dasarnja hanja ada satu koperasi jang sedjenis dan setingkat, dan selandjutnja hal ini telah ditetapkan dalam fasal 16 UU 60/1959 dan dinjatakan antara lain bahwa dalam hal diizinkan ada dua atau lebih koperasi sedjenis dan setingkat dalam salahsatu daerah kerdja,

maka pedjabat wadjib mengusahakan penjatuannja dalam waktu jang se-singkat²nja. Saja berpendapat bahwa ketentuan dalam PP 60/1959 itu ada segi positifnja, jaitu untuk menjederhanakan susunan organisasi koperasi menurut djenis dan tingkatnja, jang tentu akan baik artinja dalam kordinasinja dengan kegiatan² ekonomi dibidang lain. Akan tetapi segi lain jang harus mendapat perhatian adalah bahwa dengan ketentuan ini bisa terdjadi pensalahgunaan tertentu, jaitu mungkinnja „dimonopoli" pembentukan² koperasi oleh salah-satu golongan dengan tanpa mengindahkan bahwa ada golongan lain jang tidak mendapat kesempatan ambil bagian dalam kegiatan gerakan koperasi. Perbuatan „memonopoli" itu tidak sesuai dengan prinsip koperasi dan bertentangan dengan kepentingan Rakjat. Praktek² jang mensalahgunakan ketetapan dalam UU dan PP 60/1959 itu harus ditentang. Salahsatu tjara dalam mentjegah pensalahgunaan ketetapan² itu adalah mengembangkan semangat persatuan nasional jang berporoskan Nasakom dalam kegiatan gerakan koperasi disemua tingkat maupun djenis. Dengan demikian koperasi mendjadi tempat bersatu semua aliran jang hidup untuk kegiatan² jang langsung bermanfaat dan menguntungkan massa Rakjat.

Saja berpendapat dan jakin, bahwa sedjalan dengan perkembangan revolusi Indonesia gerakan koperasi akan memainkan peranan jang makin penting dalam kehidupan ekonomi negeri kita.

Sudah djelas tertjantum dalam UU Dasar '45 fasal 33, bahwa koperasi disamping sektor ekonomi negara (perusahaan² negara) akan merupakan landasan pokok dari susunan ekonomi negeri.

Dalam perspektif revolusi kita jaitu Sosialisme, dimana dihapuskan samasekali penghisapan oleh manusia atas manusia, **ekonomi negara** (perusahaan² negara) dan **ekonomi kolektif** (koperasi² sosialis) adalah merupakan dua unsur jang saling membantu dan memperkuat dalam ekonomi negeri.

Akan tetapi seperti tadi saja kemukakan, pada waktu ini kita belum memasuki taraf itu, karenanja belum praktis berbitjara tentang koperasi sosialis, ketjuali sebagai satu gerakan propaganda dan pendidikan kepada massa.

Bahkan taraf peralihan ke Sosialismepun belum kita masuki, karena rintangan² strategisnja belum kita hantjurkan, jaitu kekuasaan modal monopoli asing atau imperialisme dan tuantanah. Untuk mengembangkan perdjuangan menghantjurkan rintangan strategis itu tadi telah saja kemukakan tentang keharusan mutlak melakukan pengubahan sistim masjarakat dengan melikwidasi penghisap² besar dikota dan desa, menghapuskan kekuasaan ekonomi kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah, membebaskan Rakjat pekerdja didesa dari penghisapan feodal dan mengalahkan djaringan² kekuatan ekonomi dalam negeri jang mendjadi landasan daripada imperialisme. Untuk itu sebagaimana telah saja kemukakan tadi dan telah mendjadi tuntutan massa jang luas dan djuga mendjadi Program Front Nasional, perlu ditjiptakan suatu kekuasaan politik baru, kekuasaan Gotong Rojong jang berporoskan Nasakom dari atas sampai kebawah, dari Pemerintah pusat sampai pemerintah² daerah terendah.

Seperti halnja harapan dan andjuran Presiden Sukarno kepada gerakan koperasi, jaitu supaja koperasi tidak hanja mendjadi alat ekonomi daripada anggotanja, melainkan djuga mendjadi alat perdjuangan revolusioner dalam menjelesaikan revolusi, tibalah bagi saja untuk menutup uraian ini dengan harapan dan andjuran sbb. :

Pertama, gerakan koperasi kita supaja betul² mendjadi gerakan ekonomi jang berdjuang untuk perbaikan² tingkat hidup massa anggotanja, massa Rakjat pekerdja jang ekonominja sekarang lemah. Gerakan koperasi kita hanja akan konsekwen mendjalankan peranan jang demikian, apabila keanggotaan dan pimpinannja memang benar² terdiri dari Rakjat pekerdja jang membutuhkan bersama alat perdjuangan ekonomi itu. Dalam keadaan demikian gerakan koperasi kita akan betul² dapat mengibarkan tinggi² bendera jang diberikan Manipol kepadanja, jaitu bendera **koperasi progresif.**

Kedua, sebagai koperasi progresif gerakan koperasi kita tidak hanja ambilbagian dalam kegiatan ekonomi, tetapi djuga dalam kegiatan revolusioner pada umumnja, harus setia dan giat ambilbagian dalam pelaksanaan Manipol, Ketetapan² MPRS dan Pantja Program

Front Nasional serta penjebar jang aktif daripada 9 Wedjangan Presiden.

Jang terachir, dengan ini saja menjampaikan utjapan selamat atas sukses² dari kegiatan gerakan koperasi selama ini baik jang dilakukan oleh aktivis² gerakan koperasi, maupun kegiatan jang bersifat bimbingan dari pedjabat² Departemen Koperasi. Sudah waktunja gerakan koperasi kita dan Departemen Koperasi segera menjimpulkan pengalaman dari kegiatan gerakan koperasi selama ini, untuk dengan demikian dapat mengembangkan segi² jang positif dan dengan segera pula melikwidasi segi² jang negatif.

(Pokok² pidato jang diutjapkan pada siang tanggal 28 Februari 1963 di gedung Lembaga Administrasi Negara, Djakarta)

KEMBANGKAN GERAKAN KOPERASI UNTUK MENGURANGI KESULITAN² BEBAN HIDUP RAKJAT DAN DALAM RANGKA MEMBANGUN EKONOMI NASIONAL

Atas nama Pimpinan MPRS saja mengutjapkan selamat atas berlangsungnja Musajawarah Pembiajaan Koperasi ini dan mengharapkan mentjapai hasil seperti jang diharapkan oleh kita semua.

Saja sangat gembira dan merasa beruntung mendapat tugas dari Pimpinan MPRS menghadiri Musjawarah ini, karena pada kesempatan ini saja dapat bertemu dan berhadapan langsung dengan Sdr.² semua, terutama Sdr.² pemimpin² dari berbagai gerakan koperasi seluruh Indonesia. Kegembiraan saja adalah djuga karena suatu kenjataan, bahwa gerakan koperasi dinegeri kita, dalam batas² tertentu mentjapai beberapa kemadjuan. Dari laporan² jang saja peroleh, misalnja koperasi konsumsi, telah terbentuk disemua daerah tingkat I, hampir disemua daerah tingkat II, dan mulai merata di-kampung² dan desa² diseluruh pendjuru tanah air kita. Koperasi² konsumsi ini, dalam kegiatannja, bukan sadja telah dapat mendjadi badan penjalur untuk distribusi bagi anggota²nja, bahkan diberbagai tempat telah dapat mendjalankan peranan dalam mendistribusikan kebutuhan² pokok Rakjat bagi semua penduduk dilingkungannja.

Adanja musjawarah pembiajaan dari gerakan koperasi ini sendiri menundjukkan perkembangannja jang telah memerlukan pemetjahan dalam masalah permodalan dan kredit. Kita semua tentu mengharapkan supaja perkembangan gerakan koperasi dinegeri kita mendjadi semakin madju, untuk dapat mengambil peranannja jang tepat dalam mengurangi dan meringankan kesulitan² beban hidup Rakjat, chususnja anggota²nja dan dalam perdjuangan untuk membangun ekonomi nasional.

Untuk dapat meletakkan peranan gerakan koperasi setjara tepat dalam perdjuangan untuk membangun ekonomi nasional, dalam melikwidasi sisa² ekonomi ko-

lonial dan feodal, perlu kiranja kita ingat bahwa Manipol menetapkan, ekonomi sektor negara harus memegang posisi komando dalam kehidupan ekonomi negeri. Peranan gerakan koperasi harus ditudjukan untuk membantu memperkuat posisi komando dari ekonomi sektor negara ini, sebaliknja negara berkewadjiban membantu gerakan koperasi dengan bimbingan, kredit dan fasilitet² lain. Negara berkewadjiban mengembangkan gerakan koperasi, karena gerakan koperasi, walaupun bukan modal negara, tidak mau mendjadi gerakan dan organisasi kapitalis.

Koperasi di Indonesia bergerak di-tengah² struktur kemodalan dimana terdapat ekonomi sektor negara jang semakin kuat, ekonomi sektor swasta nasional, dan ekonomi sektor swasta asing monopoli serta ekonomi feodal di-desa². Karena itu tidak heran, apabila gerakan koperasi kita kehidupannja dipengaruhi oleh kegiatan² daripada struktur permodalan ini, sedang kewadjiban gerakan koperasi adalah untuk mendudukkan dirinja pada peranan memperkuat ekonomi sektor negara jang memimpin perkembangan ekonomi negara kita.

Kegiatan memperluas gerakan koperasi termasuk didalam pelaksanaan pembangunan Nasional semesta berentjana jang ditetapkan oleh MPRS, karena itu selalu didalam pelaksanaannja kita mengingat Amanat Pembangunan Presiden jang menjatakan antara lain :

„Supaja pembangunan menjempurnakan ekonomi terpimpin sedjalan dengan tjita² demokrasi terpimpin untuk melenjapkan sisa² ekonomi kolonial, tjegah bahaja paham kapitalisme dan free fight liberalism baik dari luar negeri maupun dalam negeri".

Apa jang dinjatakan didalam Amanat Pembangunan ini oleh Presiden djuga telah ber-ulang² dikemukakan pada kesempatan lain.

Pada kesempatan ini saja merasa perlu mengulangi dan memperkuat pula apa jang pernah ditjanangkan oleh Sdr. Menteri Transkopemada dalam suatu Kongres Koperasi sbb. : **„Djustru didalam keadaan pantjaroba seperti jang kita alami dewasa ini, Saudara² akan mendjumpai usaha² beberapa golongan jang untuk kepentingan golongan itu sendiri mempergunakan nama Koperasi. Terutama mereka itulah jang selalu memper-**

gunakan dan menuntut kepada hak koperasi, tetapi tanpa memperhatikan kebutuhan daripada konsumen. Inilah jang saja sebut „pseudo koperasi", jaitu jang mempergunakan rakjat untuk koperasi dan bukannja koperasi untuk rakjat. Usaha² demikian ini adalah usaha orang² bermodal jang setjara kolektif mengembangkan modalnja. Tjara seperti ini adalah tjara kapitalis dan bertentangan dengan azas kekeluargaan, dengan azas sosialis dan bertentangan dengan azas koperasi".

Amanat Pembangunan Presiden dan pidato Menteri Transkopemada ini, sengadja saja kutip untuk dapat menilai perkembangan koperasi tidak setjara berat sebelah, jaitu disamping memberikan penilaian kepada kemadjuan² tertentu jang ditjapai serta mengharapkan perkembangan madju lebih landjut, kita tidak dapat menutup mata terhadap kenjataan² perkembangan negatif jang perlu diatasi. Pada pokoknja kekurangan² masih terdapat didalam gerakan koperasi kita dalam hal jang berhubungan dengan prinsip koperasi; pembangunan organisasi dan kegiatan se-hari².

Ketetapan MPRS maupun Undang² Koperasi menggariskan, bahwa koperasi adalah kumpulan daripada orang² jang ber-sama² mengadakan kegiatan ekonomi dan sosial, jang dibentuk atas dasar kesukarelaan dan demokratis. Koperasi akan tumbuh sehat dan dapat memenuhi tudjuan pembentukannja, djika tidak diabaikan prinsip² sukarela, terbuka (artinja tidak ada rahasia bagi anggota²nja) dan menguntungkan. Prinsip² itu hanja mungkin terdjamin apabila koperasi dipimpin oleh orang² jang djudjur dan Manipolis.

Tidak dipegangnja setjara teguh prinsip² jang digariskan oleh MPRS maupun Undang² Koperasi, tidak dibangunnja koperasi² dari bawah atas dasar kesedaran, melainkan dengan tjara ter-gesa² main tundjuk dari atas, tidak didjundjungnja hak² anggota untuk mengadakan kontrol, seperti banjaknja pengalaman, bahwa rapat² anggota koperasi hanja dilakukan sekali waktu pendiriannja sadja, dengan maksud untuk dapat menghimpun modal, tetapi kemudian ber-tahun² tidak dilangsungan rapat² anggota, praktek² keorganisasian seperti ini adalah merugikan perkembangan koperasi.

Adalah perlu mendapat perhatian kita, supaja ge-

rakan koperasi bisa tumbuh sebagai pohon diudara bebas dan djangan seperti „kamerplant" (tanaman penghias kamar) jang hidup karena disirami terus-menerus, artinja gerakan koperasi supaja tumbuh setjara wadjar dan demokratis serta tidak menggantung kepada bantuan se-mata².

Bantuan dari Pemerintah dan bantuan dari luar lainnja kepada gerakan koperasi harus bersifat bimbingan jang mengembangkan gerakan koperasi.

Hal lain jang memerlukan perhatian dari gerakan koperasi kita adalah bagaimana gerakan melawan liberalisme dan mendjauhi terus-menerus sifat perusahaan kapitalis, atau didalam praktek adalah mentjegah djangan sampai pengurus² koperasi memperalat koperasi dan anggota²nja untuk praktek² kapitalis maupun sebagai kaki-tangan kapitalis.

Saja merasa perlu djuga untuk mengemukakan, kiranja gerakan koperasi kita perlu diarahkan kepada kegiatan membangun dan mengembangkan lapangan² atau djenis² koperasi jang paling objektif dibutuhkan oleh Rakjat terbanjak. Djenis² koperasi jang paling dibutuhkan Rakjat dewasa ini adalah koperasi konsumsi, koperasi produksi dan koperasi kredit. Golongan Rakjat desa jang paling membutuhkan koperasi adalah kaum tanimiskin, kaum buruhtani, tanisedang, dan djuga kaum nelajan. Di-kota² dalam keadaan krisis sandang-pangan seperti sekarang ini, koperasi konsumsi sangat dibutuhkan oleh sebagian besar lapisan penduduk. Mengenai koperasi kredit atau jang disebut koperasi simpan-pindjam, berhubung tjepatnja merosotnilai uang, sekarang ini mengalami lebih banjak kesulitan.

Setelah saja kemukakan masalah koperasi setjara umum, ingin saja menjumbangkan pikiran sedikit tentang pokok atjara dan persoalan daripada musjawarah ini. Tentu sadja saja hanja akan mengemukakan beberapa pokok sadja.

Saja berpendapat, bahwa memang sudah waktunja gerakan koperasi kita membitjarakan persoalan pembiajaan koperasi. Saja kemukakan demikian berdasarkan dua alasan, pertama karena persoalannja memang sudah merupakan persoalan jang harus dipetjahkan berdasarkan perkembangan kebutuhan daripada ge-

rakan koperasi kita, dan **kedua** dengan dimusjawarahkannja setjara chusus persoalan pembiajaan koperasi ini, kita akan mentjapai kesimpulan² jang tegas dan kongkrit, bukan sadja untuk mendorong perkembangan gerakan koperasi kita, tetapi lebih² untuk mentjegah perkembangannja kearah jang tidak sesuai dengan azas² koperasi.

Dari pokok² persoalan jang disadjikan oleh Panitia Penjelenggara Musjawarah, dikemukakan antara lain kenjataan² tentang perlunja ketegasan didalam kebidjaksanaan pemerintah dan tindakan² setjara kongkrit mengenai permodalan dan pengkreditan koperasi. Djuga dikemukakan persoalan penjaluran permodalan dan kredit dari swasta nasional kedalam gerakan koperasi disamping persoalan penghimpunan modal dari lingkungan gerakan koperasi sendiri.

Saja perlu menambahkan, bahwa didalam kenjataannja, memang kegiatan gerakan koperasi kita dibidang produksi dan konsumsi mengalami rintangan² dalam perkembangannja, disebabkan tidak tjukupnja modal dan tidak atau sukarnja didapat kredit. Dalam pada itu tidak sedikit gerakan koperasi kita terdjerumus kedalam „pengkreditan" daripada bank² gelap atau praktek² kapitalis, jang memberikan „kredit" dengan bunga² jang tinggi atau perdjandjian² dan sjarat² jang tidak menguntungkan perkembangan koperasi.

Walaupun demikian saja berpendapat, adalah tidak perlu disesalkan kenjataan bahwa koperasi² kita lemah permodalannja, karena gerakan koperasi kita seharusnja adalah bukan „koperasi" kapitalis, sedang didalam praktek dan pertumbuhannja mengalami gangguan² dari kaum kapitalis monopoli asing, tuantanah dan kaum kapitalis birokrat jang sekarang ini menguasai uang jang beredar dan berspekulasi dalam peredaran barang² dagangan.

Dari kenjataan² ini, maka dirasakan benar mendesaknja realisasi kredit² Pemerintah kepada kegiatan koperasi, demikian pula perlunja perbaikan aparatur pengkreditan pemerintah jang melajani gerakan koperasi. Perluasan djaringan² aparatur kredit dari Bank² Pemerintah jang sudah ada sampai ke-basis² kegiatan gerakan koperasi diperlukan, disamping itu perlu per-

baikan prosedure pengkreditan untuk mentjapai tjara² jang praktis tetapi tetap zakelijk dalam pemberian² kredit² kepada gerakan koperasi.

Melalui bimbingan dan pengawasan dari petugas² Departemen Koperasi jang ada diseluruh negeri, kiranja terdapat djaminan bahwa kredit² Pemerintah bagi gerakan koperasi akan langsung djatuh kepada gerakan koperasi dan digunakan setjara efektif serta efisien dalam kegiatan ekonomi, chususnja dibidang produksi pertanian dan keradjinan tangan serta dibidang distribusi barang konsumsi keperluan hidup pokok daripada Rakjat.

Mengenai penjaluran modal dan pengkreditan dari kalangan swasta nasional jang progresif kepada kegiatan gerakan koperasi, memang merupakan persoalan praktis jang perlu pula digariskan.

Saja berpendapat bahwa penjaluran modal dan kredit swasta nasional jang progresif kepada kegiatan gerakan koperasi adalah suatu jang mungkin dapat direalisasi, apabila ia dilakukan atas prinsip dan pendirian sosial dari golongan swasta nasional progresif, diadi bukan dengan prinsip kapitalis jang bermaksud menunggangi gerakan dan kegiatan ekonomi koperasi. Tjara² jang zakelijk didalam kredit dengan ketentuan bunga jang sesuai dengan ketentuan² Pemerintah, atau perdjandjian² jang menguntungkan bagi gerakan koperasi dapat dilaksanakan. Sikap membantu dari swasta nasional jang progresif kepada kegiatan ekonomi koperasi, disamping sikap membantu dan membimbing daripada Pemerintah kepada ekonomi swasta nasional dan chususnja kegiatan ekonomi gerakan koperasi, dimungkinkan karena persamaan kepentingan swasta nasional jang progresif dengan gerakan koperasi daripada Rakjat dalam revolusi nasional kita, jaitu untuk menegakkan ekonomi nasional jang bebas dari ketergantungannja kepada imperialisme dan pula bebas dari halangan² feodal, atau tegasnja persamaan kepentingan daripada golongan swasta nasional jang progresif dengan gerakan koperasi daripada Rakjat, adalah karena sama² anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Sesuai dengan prinsip ekonomi terpimpin menudju kepada pembangunan ekonomi nasional, serta azas²

koperasi, maka gerakan koperasi haruslah ditjegah untuk didjadikan saluran guna penanaman modal asing dalam bentuk apapun, jang klasik maupun bentuk²nja jang baru tetapi berhakekat sama. Koperasi kita tidak boleh mendjadi saluran neo-kolonialisme.

Achirnja, mengenai penggalangan modal jang bersumber pada gerakan koperasi sendiri tentu tidak mungkin kita mengharapkan mentjapai djumlah jang besar, mengingat koperasi² kita, seperti saja uraikan diatas adalah bukan ,,koperasi kapitalis'', lagi pula azas koperasi adalah bukan untuk melakukan konsentrasi modal, karena itu kegiatan penghimpunan modal dari saham², simpanan² dan hasil kegiatan koperasi haruslah dengan prinsip tidak memberatkan anggota²nja jang terdiri daripada Rakjat jang ekonominja lemah, dan djustru berkoperasi untuk meringankan beban hidupnja.

Dengan mengerti akan peranan koperasi setjara tepat didalam melaksanakan garis politik ekonomi jang sesuai dengan Manipol, sesuai dengan ketetapan² MPRS, didalam membantu memperkuat sektor ekonomi Negara, dan sebaliknja dengan bantuan, bimbingan, kredit dan fasilitet² lain dari Pemerintah kepada kegiatan ekonomi koperasi, seperti penjaluran² barang² produksi Perusahaan² Negara, atau Perusahaan² Dagang Negara dan fasilitet lain misalnja dibidang pengangkutan dan lain²nja, saja berpendapat gerakan koperasi kita akan terus berkembang dan melaksanakan tugasnja dengan baik.

Demikianlah beberapa hal jang dapat saja kemukakan dalam musjawarah pembiajaan koperasi ini. Sekali lagi saja mengharapkan perkembangan madju lebih landjut daripada gerakan koperasi kita dan mengharapkan berhasilnja musjawarah menjimpulkan pengalaman²nja setjara tepat terhadap persoalan pembiajaan koperasi, dalam hubungannja dengan masalah ekonomi negeri kita pada umumnja dan didalam rangka penielesaian revolusi nasional kita.

Terima kasih.

(Sambutan sebagai Wakil Ketua MPRS pada Musjawarah Pembiajaan Koperasi tanggal 13 November 1962 di Tjipajung)

PNRI. NEG. RI

Sampul P.I.R. 336 — 63